

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI PASCA BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022
(Studi Kasus pada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero))**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



KHARISMA APRILIA SHOLEKHAH

1211002001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Kharisma Aprilia Sholekhah

NIM : 1211002001

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kharisma Aprilia Sholekhah', with a stylized flourish at the end.

Tanggal : 04 September 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh,

Nama : Kharisma Aprilia Sholekhah
NIM : 1211002001
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan atas Jasa Konsultansi
Konstruksi pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2022 (Studi Kasus pada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero))

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.



(.....)

Penguji I : Dr. Hermiyetti, S.E., M.Si., CSRS, CSRA,
CAPM, CAPF



(.....)

Penguji II : Dr. Tita Djuitaningsih, SE, M. Si., Ak., CA



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 04 September 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan proposal tugas akhir ini dengan baik. Penulisan proposal tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan penuh dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga penyusunan proposal ini, penulis akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan, baik dalam bentuk bantuan maupun doa, selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral dan spiritual, serta doa yang tiada henti menguatkan penulis menjalani masa perkuliahan.
3. Bapak Rene Johannes, S.E., M.Si., M.M., Ak., CA, CPMA, CPA, selaku Dosen Perpajakan, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga penyusunan Tugas Akhir selesai.
4. Seluruh karyawan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) atas bantuan, dukungan, dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan hati yang telah diberikan. Semoga proposal tugas akhir ini nantinya dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 04 September 2025



Kharisma Aprilia Sholekhah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Aprilia Sholekhah
NIM : 1211002001
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022
(Studi Kasus pada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero))”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 04 September 2025

Yang menyatakan



Kharisma Aprilia Sholekhah

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022
(Studi Kasus pada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero))**

Kharisma Aprilia Sholekhah ¹

ABSTRAK

Dalam praktik perpajakan di Indonesia, sektor jasa konstruksi memiliki peran penting karena kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Perubahan regulasi melalui PP 9/2022 menghadirkan perubahan signifikan dalam mekanisme pengenaan pajak pada sektor ini, terutama yang terkait dengan jasa konsultasi konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa konsultasi konstruksi pasca diberlakukannya PP 9/2022. Regulasi tersebut berdampak pada pengenaan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat (2), khususnya dalam mekanisme perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak jasa konsultasi konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian mencakup sumber primer maupun sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek penelitian difokuskan pada penerapan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat (2) atas transaksi jasa konsultasi konstruksi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik untuk memastikan reliabilitas dan akurasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan atas jasa konsultasi konstruksi, khususnya terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2), pada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP 9/2022. Aspek yang telah terpenuhi mencakup klasifikasi jasa konsultasi konstruksi sesuai dengan PP 9/2022 Pasal 2, pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto yang didukung dengan dokumentasi e-Bupot dan pelaporan SPT Masa PPh 23, serta proses penyeteroran dan pelaporan yang umumnya tepat waktu. Meski demikian, terdapat kendala seperti penolakan pemotongan oleh vendor Non-PKP, keterlambatan penyeteroran PPh Pasal 4 Ayat (2) akibat kesalahan tarif dan verifikasi dokumen, serta pengalihan alokasi dana pajak untuk operasional lain. Kondisi tersebut mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan serta penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Kata Kunci: PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, Jasa Konsultasi Konstruksi

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Bakrie

***ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE ON CONSTRUCTION CONSULTANCY
SERVICES FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 9 OF 2022
(Case Study on PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero))***

Kharisma Aprilia Sholekhah ¹

ABSTRACT

In Indonesia's taxation practice, the construction services sector plays a crucial role due to its significant overall contribution to national development. The regulatory change through Government Regulation Number 9 of the Year 2022 introduced substantial adjustments in the taxation mechanism of this sector, particularly related to consultancy services. This study aims to analyze the fulfillment of tax obligations on construction consultancy services following the enactment of Government Regulation Number 9 of 2022. The regulation affects the imposition of Income Tax Articles 23 and 4(2), especially in the calculation, withholding, remittance, and reporting mechanisms. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained from primary and secondary sources through interviews, observations, and documentation. The research object focuses on the the implementation of Income Tax Articles 23 and 4(2) in consultancy services, with data validated through triangulation technique. The study indicates that PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) has not fully complied with Government Regulation No. 9 of 2022 regarding tax obligations for construction consultancy services, specifically regarding Article 23 and Article 4 Paragraph (2) Income Tax (PPh). Compliance was observed in service classification under Article 2 of PP 9/2022 and in applying 2% PPh 23 withholding on gross income, supported by e-Bupot records and timely tax reporting. Nevertheless, issues such as Non-VAT vendors refusing withholding, delays in Article 4 Paragraph (2) PPh deposits due to incorrect rates and document verification, and reallocation of tax funds for other operational needs have led to administrative sanctions, including late payment interest and Tax Collection Notices (STP).

Keywords: *Article 23 of the Income Tax (PPh), Article 4, Paragraph (2) of the Income Tax (PPh), Construction Consultancy Services, Government Regulation Number 9 of 2022*

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Bakrie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.5.2 Manfaat Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
2.1 Definisi Konsep dan Pendekatan Teori.....	6
2.1.1 Teori Kebijakan Publik (<i>Public Policy Theory</i>).....	6
2.1.2 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	6
2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.....	12
2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh).....	13
2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	16
2.1.7 Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Perspektif Perpajakan ...	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Metode Penelitian.....	20
3.2 Objek Penelitian.....	20
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.3.1 Sumber Data.....	21
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.4 Instrumen Penelitian.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
3.6 Pengujian Keabsahan Data.....	27
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	28
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	28
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	29
4.1.4 Legalitas Perusahaan.....	30
4.2 Temuan Penelitian.....	31

4.2.1 Deskripsi Narasumber.....	31
4.2.2 Hasil Pengumpulan Data.....	32
4.3 Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	27
Gambar 4.1 Logo PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).....	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).....	30
Gambar 4.3 Alur Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	31
Gambar 4.4 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.....	39
Gambar 4.5 Bukti Penyetoran PPh Pasal 23.....	39
Gambar 4.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.....	40
Gambar 4.7 Pengenaan Tarif 3,5% pada Laporan Keuangan Tahun 2024.....	43
Gambar 4.8 Bukti Pemotongan 3,5% PPh Pasal 4 Ayat (2).....	43
Gambar 4.9 Bukti Pemotongan 10% PPh Pasal 4 Ayat (2).....	44
Gambar 4.10 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).....	44
Gambar 4.11 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	45
Gambar 4.12 Pengenaan Surat Tagihan Pajak (STP).....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
Tabel 2.2 Pihak yang Memotong PPh Pasal 23.....	15
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	16
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	22
Tabel 3.2 Checklist Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan PP 9/2022.....	25
Tabel 4.1 Rekapitulasi Bruto Per Bulan Tahun 2024.....	38
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 23.....	38
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2).....	42
Tabel 4.4 Kesalahan Klasifikasi PPh Final.....	45
Tabel 4.5 Kepatuhan Pembayaran Pajak.....	47
Tabel 4.8 Kepatuhan Pelaporan Pajak.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU).....	54
Lampiran 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).....	55
Lampiran 3. Sertifikat Keahlian.....	56
Lampiran 4. Hasil Wawancara.....	57
Lampiran 5. Hasil Observasi.....	63
Lampiran 6. Surat Perintah Kerja (SPK).....	65
Lampiran 7. Surat Keterangan Tidak Dikukuhkan Sebagai PKP.....	66
Lampiran 8. Surat Pernyataan Non-PKP.....	67
Lampiran 9. Komunikasi PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) Dengan <i>Vendor</i>	68
Lampiran 10. Mitra Kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).....	69
Lampiran 11. Bukti Kesalahan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2).....	70
Lampiran 12. Monitoring Kepatuhan Perpajakan.....	71